

# MENGUJI HAK POLITIK DALAM KONTESTASI POLITIK; ANALISIS TERHADAP POLITIK IDENTITAS ETNIS DI DESA PERDAMAIAN, KECAMATAN BINJAI, KABUPATEN LANGKAT

*Prayetno*<sup>1</sup>

## *Abstract*

*Political identity can also be shaped by ethnic is frequently taken as a strategic commodity and issue in most recent events of political contestation in Indonesia both in national and local even in village level. That is long believed that conditions would be threatened the running of democracy in Indonesia even though right to vote and elected are endorsed and guaranteed by Indonesian Constitution 1945. This study was carried out during the election in Desa Perdamaian at Langkat regent in 2016. This article examines the Banjar ethnic that was made as a main issue in political identity to win the election at Desa Perdamaian in 2016.*

*Key words: ethnic, political identity, election*

## *Pendahuluan*

Artikel ini merupakan elaborasi dan ulasan dari hasil penelitian kolaborasi tentang politik identitas dalam kontestasi politik lokal di perdesaan. Tujuan dalam penulisan ini adalah untuk menggali dan menyajikan lebih dalam bagaimana identitas etnis masih menjadi faktor dominan masyarakat dalam menggunakan hak politiknya pada proses pemilihan kepala desa (pilkades) di Desa Perdamaian, kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat tahun 2016.

Desa merupakan entitas dan unit terkecil dari sebuah pemerintahan. Dasar hukum pelaksanaan pemerintah desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya UU

---

<sup>1</sup>Penulis adalah Dosen PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan (FIS Unimed). Email: [eno.pray@gmail.com](mailto:eno.pray@gmail.com).

Desa) yang memberikan landasan kuat bagi desa untuk menjalankan pemerintahannya secara otonom.

Kewenangan penuh diberikan oleh UU Desa untuk mengatur urusan desa secara mandiri di bidang sosial, politik dan ekonomi dalam sistem pemerintah desa, kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat desa dari calon yang memenuhi syarat melalui proses kontestasi pemilihan secara langsung. Jelas bahwa pemenangnya akan ditentukan berdasarkan perolehan suara terbanyak.

Isu yang kemudian sering muncul ke permukaan pada proses kontestasi politik pada skala nasional maupun lokal adalah mengemukakan pilihan dan perilaku politik yang dilatar belakangi oleh faktor identitas etnis. Ruang publik kemudian disesaki oleh diskusi etis tidaknya perilaku tersebut, demokratis atau tidak latar belakang perilaku pilihan tersebut dan sebagainya. Hal tersebut bisa dimaklumi mengingat masyarakat Indonesia yang terdiri atas keragaman adat, budaya, agama dan etnis dalam konteks integrasi nasional sehingga konsepsi ini menjadi model bagaimana identitas etnis menjadi penanda kemajemukan dengan tetap mengedepankan nilai persatuan dan kesatuan.

Tetapi dalam kenyataannya isu etnis sebagai komoditas politik masih kerap terjadi pada hampir setiap kontestasi politik di Indonesia. Kemajemukan etnis di Indonesia dengan cirinya masing-masing berpengaruh dalam menentukan pandangan yang berbeda terhadap permasalahan sosial dan politik yang terjadi. Sebagai sebuah sumber nilai lokal, identitas etnis mengandung unsur-unsur dan nilai ideologis. Isu identitas etnis dalam balutan nilai ideologis tersebut kerap dimanfaatkan para kontestan untuk meningkatkan elektabilitas pasangan kandidat dengan tujuan mendekatkan rasa emosional kepada pemilih yang bermuara pada kepentingan mendulang suara sebanyak mungkin dalam kontestasi politik seperti pilkades.

Mobilisasi dan politisasi dengan tujuan menyamakan langkah anggota atau perkumpulan sesama etnis dalam suatu kelompok masyarakat bahkan negara, namun hal tersebut tentu saja dalam jangka panjang bisa menjadi sumber masalah bagi keberagaman itu sendiri. Lahirnya politik etnis pada prinsipnya didasari oleh tumbuhnya sekelompok orang yang menyadari dan mengidentifikasi diri mereka ke dalam salah satu kelompok etnis tertentu, kesadaran tersebut yang pada akhirnya melahirkan solidaritas kelompok.

Demikian pula halnya apa yang terjadi pada kontestasi politik di Desa Perdamaian. Isu etnisitas lebih mengemuka ketimbang kapasitas,

kredibilitas, dan integritas dari sang kandidat. Setiap warga di Desa Perdamaian memiliki calon kandidat yang diyakini mampu memberikan kepemimpinan yang baik terhadap desa, namun afiliasi calon pemimpin yang dipilih tetap merujuk pada identitas etnis yang sama dengan dirinya. Sehingga pada proses pilkades isu etnisitas menjadi komoditas untuk memengaruhi pemikiran masyarakat.

Pemaknaan bahwa politik identitas etnis dalam pilkades di Desa Perdamaian khususnya Etnis Banjar sebagai sumber dan sarana politik dalam pertarungan perebutan kekuasaan politik sangat dimungkinkan dan semakin mengemuka dalam praktik politik sehari-hari. Sebab penduduk di Desa Perdamaian terdiri atas Etnis Banjar. Pada tahap inilah realitas politik dan proses integrasi identitas etnis bertemu. Isu-isu kebudayaan dari Etnis Banjar yaitu bubuhan dijadikan sebagai komoditas meraih simpati, yang berisikan beberapa hal penting, yaitu:

1. Bedingsanakan (persaudaraan),
2. Betu-tolongan (tolong menolong) dan
3. Mau haja bakalah bamanang (mau saja kalah menang), maksudnya mau saja memberi dan menerima.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan jika salah satu calon dari kepala desa adalah Etnis Banjar maka kebudayaan bubuhan ini dapat pula terealisasi pada saat pemilihan. Ikatan etnisitas dalam pilkades Desa Perdamaian merupakan sesuatu simbol identitas yang memiliki daya magis atau kekuatan yang didasarkan pada unsur-unsur asal atau primer yang selalu ada dalam masyarakat.

Unsur-unsur tersebut meliputi rasa kesamaan dan hubungan kekerabatan seperti pertalian darah, penganutan agama, adat kebiasaan, cara berbahasa, serta ketaatan terhadap norma sosial yang berlaku. Uraian di atas menggambarkan betapa identitas etnis dapat memainkan peran dalam konstetasi politik masyarakat dalam pilkades di Desa Perdamaian Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat tahun 2016.

### **Realisasi Hak Politik dan Pergulatan Identitas Etnis**

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, kemajemukan dan kehidupan multikultural di Indonesia menjadi faktor dominan dalam menyumbang politik identitas dalam proses kontestasi pemilihan politik. Berdasarkan teori dan pendekatan politik hal tersebut merupakan hal yang alamiah terjadi karena preferensi dan pilihan politik merupakan hak pribadi seseorang secara konstitusional. Meskipun demikian,

preferensi politik berdasarkan etnis berkepanjangan harus diakui bisa merusak harmonisasi kehidupan masyarakat dalam sistem demokrasi.

Pada perspektif hukum hak asasi manusia (HAM), hak politik pada dasarnya sebagai bagian dari HAM yang diakui dalam instrumen HAM internasional. Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political/ICCPR) melalui UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).<sup>2</sup>

Di level nasional, Indonesia memberikan jaminan hak-hak politik melalui UUDNRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Hak memilih merupakan hak dasar warga negara yang dijamin oleh konstitusi (constitutional rights) yang secara eksplisit dan implisit dituangkan ke dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2); Pasal 2 ayat (1); Pasal 6A ayat (1); Pasal 19 ayat (1); dan Pasal 22C ayat (1) UUDNRI Tahun 1945. Sementara itu, hak dipilih secara tersurat tergambar dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28; Pasal 28D ayat (3); dan Pasal 28E ayat (3).

Di sisi lain pada Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya UU HAM) menyebutkan bahwa "setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya." Pada Pasal 43 ayat (1) UU HAM juga menyebutkan, "setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara langsung umum, bebas, jujur dan adil."

UU HAM sekaligus mengamini dan memperkuat bahwa pilihan politik seseorang apapun latar belakang dan motifnya merupakan perilaku legal di mata hukum. bahkan dalam ICCPR. Atas dasar itu, realisasi pilihan politik warga negara sesungguhnya wajib dilindungi, dihormati dan dijunjung tinggi karena merupakan bagian dari hak dasar manusia.

Meskipun demikian pada perspektif politik kewarganegaraan tentu saja banyak teori yang bisa menjelaskan permasalahan identitas etnis dalam kontestasi politik. Rothschild menjelaskan politik identitas etnis dimaksudkan sebagai tuntutan personal (seseorang) untuk menunjukkan dan masuk ke dalam kelompok yang meminta kehormatan dan kekuasaan. Secara simultan, politik etnis akan memberikan suatu instrumen publik secara langsung untuk

---

<sup>2</sup>Disahkan dan diundangkan di Jakarta pada 28 Oktober 2005 (LNRI tahun 2005 No. 119, TLNRI No. 4558).

mengefektifkan kekuatan psiko-kultural etnisitas. Lebih lanjut dijelaskan tentang langkah-langkah politisasi etnisitas sebagai berikut:

1. Menumbuhkan kesadaran warganya secara kognitif tentang relevansi politik terhadap kesejahteraan budaya etnis dan sebaliknya,
2. Menstimulasi perhatian warganya tentang pentingnya hal ini bagi kelompok mereka,
3. Memobilisasi mereka ke dalam kesadaran kelompok etnis, dan
4. Melibatkan mereka secara langsung dalam aktivitas politik yang didasarkan kepada kesadaran, perhatian dan rasa memiliki terhadap kelompok tersebut.<sup>3</sup>

Sementara itu, Morowitz dalam Hiplinudin menyebutkan politik identitas adalah memberikan garis yang tegas untuk menentukan siapa yang akan disertakan dan siapa yang akan ditolak. Karena garis-garis penentuan tersebut tampak tidak dapat diubah, maka status sebagai anggota bukan anggota dengan serta merta tampak bersifat permanen.<sup>4</sup>

Beyme, sebagaimana dikutip Abdilah mengatakan karakter gerakan politik identitas memiliki tiga tahap perkembangan, yaitu:

1. Tahap pramodern yang terjadi perpecahan fundamental, kelompok-kelompok kesukuan, dan kebangsaan memunculkan gerakan social politik yang menyeluruh, dimana terjadi mobilisasi ideologis oleh para elite dalam persaingan memperebutkan kekuasaan dari penguasa ke penguasa yang baru;
2. Pada tahap modern gerakan muncul dengan adanya pendekatan kondisional, keterpecahan membutuhkan sumber-sumber untuk di mobilisasi, terjadi keseimbangan mobilisasi dari atas dan partisipasi dari bawah sehingga peran pemimpin tidak dominan lagi dan bertujuan pada pembagian kekuasaan;

---

<sup>3</sup>Hasbullah, "Agama dan Etnisitas di Pentas Politik Lokal (Tinjauan Terhadap Penggunaan Symbol Agama dan Etnis dalam Pilkada," dalam *Jurnal Ushuluddin*, Volume 17, No. 2, 2011, Halaman 11.

<sup>4</sup>Agus Hiplinudin, *Politik Identitas di Indonesia; Dari Zaman Kolonialis Belanda Hingga Repormasi (Yogyakarta: Calpulis, 2017), halaman 17.*

3. Perkembangan postmodern munculnya gerakan dari dinamikaya sendiri, protes muncul antar berbagai macam kesempatan individual, tidak ada satu kelompok atau pecahan yang dominan.<sup>5</sup>

Pada daerah yang terdiri atas multi-identitas dan etnis, politik pembedaan dapat tumbuh subur dan dapat memicu timbulnya perjuangan kelompok-kelompok terpinggirkan yang mencoba menampilkan diri dan bertahan. Jaringan etnis terdapat interaksi yang teratur antara setiap anggota sehingga dapat membentuk suatu pola pikir yang sama dengan tujuan yang sama.

Politik identitas menurut Lukmantoro adalah tindakan politis untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota-anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik berbasiskan pada ras, etnisitas, gender, atau keagamaan.

Kemunculan politik identitas merupakan respon terhadap pelaksanaan hak-hak asasi manusia yang seringkali diterapkan secara tidak adil. Lebih lanjut dikatakannya bahwa secara konkrit, kehadiran politik identitas sengaja dijalankan kelompok-kelompok masyarakat yang mengalami marginalisasi.

Hak-hak politik serta kebebasan untuk berkeyakinan mereka selama ini mendapat hambatan yang sangat signifikan. Politik identitas ini terkait dengan upaya-upaya mulai sekedar penyaluran aspirasi untuk mempengaruhi kebijakan, penguasaan atas distribusi nilai-nilai yang dipandang berharga hingga tuntutan yang paling fundamental, yakni penentuan nasib sendiri atas dasar keprimordialan. Bahkan menurut Buchari "politik identitas merupakan suatu alat perjuangan politik suatu etnis untuk mencapai tujuan tertentu, dimana kemunculannya lebihbanyak disebabkan oleh adanya faktor-faktortertentu yang dipandang oleh suatu etnis sebagaiadanya suatu tekanan berupa ketidakadilan politikyang dirasakan oleh mereka."<sup>6</sup>

Dapat ditegaskan bahwa politik identitas merupakan alat perjuangan yang dipakai suatu kelompok untuk memperjuangkan apa yang menjadi keinginan kelompok tersebut. Politik identitas pada dasarnya sering muncul ketika terjadi adanya ketidakadilan atau

---

<sup>5</sup>Ubed Abdillah, *Politik Identitas Etnis Pergulatan Tanda Tanpa Identitas* (Jakarta: Trans Media Pustaka, 2002), halaman 17.

<sup>6</sup>Sri Astuti Buchari, *Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), halaman 20.

biasanya hal tersebut juga muncul akibat adanya konflik yang melibatkan kelompok satu dengan kelompok yang lain. Hal tersebut terjadi karena merasa adanya kesamaan karakteristik atau etnis serta kesukuan suatu kelompok tersebut.

Barth mengembangkan teorinya dalam konteks identitas etnik, yang disebutnya etnisitas situasional (*situational ethnicity*). Pada batas ini para aktor berupaya mengeksploitasi symbol-simbol budaya dan menampilkan perilaku etnik tertentu yang berubah-ubah dari waktu-kewaktu, sesuai situasi tertentu, atau sesuai dengan kepentingan pribadi atau social. Hal ini dianggap penting sebab sangat terkait dengan citra diri (*self image*) dan harga diri (*self-esteem*) baik sebagai individu maupun kelompok.

Terintegrasinya unsur kebudayaan yang dianut masyarakat dalam politik melahirkan sebuah rezim pemerintahan yang menguasai, karena kelompok penguasa secara wajar akan memelihara seperangkat norma dan aturan yang berlaku untuk disosialisasikan kepada kelompok lain yang dalam kekuasaannya. Kebudayaan dalam sebuah nilai sering kali menjadi alasan utama untuk membentuk kelompok masyarakat yang lebih luas, dengan dalil untuk memperkuat dan menjaga nilai-nilai itu sendiri.

Heywood dalam Hemay menjelaskan bahwa identitas berfungsi menghubungkan aspek pribadi dengan aspek sosial sehingga individu 'tertanam' dalam konteks partikular dari budaya, sosial, institusi dan ideologi. Dengan begitu, identitas individu dapat dimunculkan secara sosial dengan bermacam-macam faktor seperti kesukuan, keagamaan, gender, kewarganegaraan dan lain sebagainya.<sup>7</sup>

Dewasa ini, hampir sulit ditemukan satu tipe masyarakatpun atau sistem politik apapun yang terbebas dari tekanan dan pengaruh politik etnis. Siapapun seolah akan bangga dan membawa sentimen etnis baik yang berbasis nilai budaya, kesukuan, ras atau bahkan golongan. Bahkan tidak jarang agama juga dijadikan komoditas politik dalam upaya mendulang suara terbanyak pada kontestasi politik. Karena disadari atau tidak faktor tersebut akan memberikan dampak terhadap diterima atau tidak diterimanya suatu sistem, negara, rezim, dan pemerintahan, serta pada saat yang sama juga menjadi alat yang efektif untuk melakukan tekanan demi kepentingan individu atau

---

<sup>7</sup>Indris Hemay dan Munandar Aris, "Politik Identitas dan Pencitraan Kandidat Gubernur Terhadap Perilaku Pemilih," dalam *Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan*, Volume 12. Nomor 01, 2016, halaman 4.

kelompok pada kompetisi untuk memperoleh kekuasaan dan kedudukan.

Penggunaan kekuatan politik identitas etnis dianggap sebagai sarana paling tepat dalam upaya mencapai kepentingan politik. Bahkan pada hampir semua level kontestasi politik, baik pemilihan presiden, legislatif, kepala daerah sampai kepada pemilihan kepala desa isu identitas etnis masih menjadi bancakan yang sangat menarik untuk ditawarkan dan di jual kepada masyarakat. Ironisnya masyarakat kemudian mengamini dan menerima hal tersebut sebagai sebuah realitas politik tanpa pertimbangan rasional.

Castells dalam Buchari menyebutkan politik identitas merupakan partisipasi individual pada kehidupan social yang lebih di tentukan oleh budaya dan psikologis seseorang. Identitas merupakan proses kontruksi dasar dari budaya dan psikokultural dari seorang individu yang memberikan arti dan tujuan hidup dari individu tersebut, karena terbentuknya identitas adalah dari proses dialog internal dan interaksi sosial.<sup>8</sup>

Politik identitas merupakan sesuatu yang berkembang dan hidup atau ada dalam setiap etnis, keberadaannya bersifat laten dan potensial namun bisa dirasakan, dan pada kondisi tertentu dapat muncul ke permukaan sebagai kekuatan politik yang dominan. Sementara manifestasi politik identitas merupakan aktualisasi perilaku politik yang sudah ada yang diwujudkan dalam bentuk budaya masyarakat dan mengalami proses yang semakin maju serta secara terus menerus tumbuh dan berkembang di dalam kebudayaan masyarakat dalam suatu jalinan interaksi social.

Kristianus menegaskan politik identitas merupakan tindakan politik untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota-anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik berbasiskan pada ras, etnisitas, jender, atau keagamaan.<sup>9</sup>

Muara dari lahirnya politik identitas tersebut pada dasarnya adalah politik kekuasaan. Menjadikan identitas etnis sebagai komoditas politik merupakan langkah mempengaruhi pihak lain agar dapat memenuhi keinginannya.

---

<sup>8</sup>Sri Astuti Buchari, *op.cit.*, halaman 19.

<sup>9</sup>Kristianus, "Nasionalisme Etnik di Kalimantan Barat," dalam LIPI, edisi XXXVII, No. 2, 2011, halaman 149.



## ***Prayetno: Menguji Hak Politik Dalam Kontestasi Politik***

Masyarakat dengan identitas yang sama memiliki kerentanan untuk dijadikan objek bagi penguatan identitas politik seseorang. Pada akhirnya penguatan identitas politik tersebut berujung pada legitimasi kekuasaan dalam upaya menguatkan tujuan kelompok kepentingannya. Yang perlu disadari adalah jika identitas politik berbasis etnis semakin menguat maka akan mengganggu hak-hak orang lain di luar etnis tersebut, hal tersebut bisa saja memicu terjadinya kesenjangan sosial.

Menurut Castells dalam Buchari ada tiga pembentukan dalam membangun sebuah identitas, yaitu sebagai berikut:

1. Identitas legitimasi (*legitimizing identity*), yaitu identitas yang diperkenalkan oleh sebuah institusi yang mendominasi suatu masyarakat yang merasionalisasikan dan melanjutkan dominasinya terhadap aktor-aktor sosial, misalnya suatu institusi negara yang mencoba meningkatkan identitas kebangsaan anggota masyarakat. Institusi tersebut memang telah mendapatkan legitimasi untuk melakukan hal tersebut;
2. Identitas resisten (*resistance identity*) yaitu sebuah proses pembentukan identitas oleh aktor-aktor sosial yang dalam kondisi tertekan dengan adanya dominasi dan stereotipe oleh pihak-pihak lain sehingga membentuk resistensi dan pemunculan identitas yang berbeda dari pihak yang mendominasi, dengan tujuan untuk kelangsungan hidup kelompok atau golongannya. Sebuah terminologi yang disebutkan ketika Calhoun mengidentifikasi munculnya politik identitas;
3. Identitas proyek (*project identity*) yaitu suatu identitas di mana aktor-aktor sosial membentuk suatu identitas baru yang dapat menentukan posisi-posisi baru dalam masyarakat sekaligus mentransformasi struktur masyarakat secara keseluruhan. Hal ini misalnya, terjadi ketika sekelompok aktivis feminisme berusaha membentuk identitas baru perempuan, menegosiasikan posisi perempuan dalam masyarakat, dan akhirnya mengubah struktur masyarakat secara keseluruhan dalam memandang peranan perempuan.<sup>10</sup>

Heller mengatakan politik identitas adalah sebagai konsep dan gerakan politik yang focus perhatiannya adalah perbedaan (*difference*)

---

<sup>10</sup>*Sri Astuti Buchari, op.cit., halaman.23.*

sebagai suatu kategori politik yang utama. Politik perbedaan menjadi suatu nama baru dari politik identitas dalam hal etnis, gender, atau keagamaan.<sup>11</sup>

Selanjutnya dapat dimaknai bahwa politik identitas adalah tindakan politik yang digunakan untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas dan karakteristik yang berdasarkan ras, etnis, gender, atau agama. Politik identitas bukan politik yang dimaknai dengan politik tradisional saja, namun politik identitas juga dibangun dalam proses pemilihan yang dilakukan secara intens dalam bentuk interaksi simbolik untuk memobilisasi dukungan massa.

Inti dari semua itu, kemunculan politik etnis diawali oleh tumbuhnya kesadaran yang mengidentikan mereka ke dalam suatu golongan atau kelompok tertentu. Kesadaran ini kemudian memunculkan solidaritas kekelompokan dan kebangsaan. Politik identitas saat ini telah mengalami pergeseran makna identitas sesungguhnya karena identitas digunakan bukan semata untuk kepentingan identitas itu sendiri, melainkan lebih untuk kepentingan elit politik, bahkan sampai pada tingkatan elit di perdesaan.

### **Politik Identitas dalam Kontestasi Pilkades Desa Perdamaian Tahun 2016**

Desa Perdamaian menjadi obyek pembahasan dikarenakan intensitas identitas politik yang cukup kentara pada saat kontestasi pilkades pada tahun 2016 lalu. Sebagaimana diketahui, pada prinsipnya pemilihan kepala desa adalah salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi yang bertujuan untuk menciptakan sebuah tatanan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan demokratis.

Pilkades yang karena konsekuensi dari otonomi daerah dan sistem demokrasi mengharuskan pelaksanaannya dengan cara langsung, yaitu dengan melibatkan seluruh masyarakat yang memiliki hak pilih. namun pemilihan pilkades kini banyak menuai masalah.

Dalam masyarakat yang multietnik, dinamika politik senantiasa memiliki tegangan yang lebih tinggi dibandingkan pada daerah yang relatif homogen. Hal tersebut dapat di lihat pada kontestasi politik di tingkat lokal yang selalu menyita perhatian pengamat politik, karena persaingan yang melibatkan simbol-simbol etnisitas baik agama, suku, putra daerah atau pendatang. Simbol-simbol tersebut kerap dijadikan isu

---

<sup>11</sup>Ubaedilah, op..cit., halaman.16.

politik dalam sosialisasi dan komunikasi politik para calon yang bersaing seperti dalam pilkades.

Tidak bisa dipungkiri bahwa etnis sendiri merupakan suatu konsep budaya yang terpusat pada kesamaan norma, nilai, kepercayaan, simbol dan praktik budaya yang dipraktikkan secara turun menurun. Terbentuknya suku bangsa yang ada di nusantara sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari budaya yang dimiliki secara bersama yang telah berkembang dalam konteks historis, sosial, dan politis yang mendorong rasa memiliki.

Hal tersebut juga yang pada akhirnya menyebabkan aspek identitas etnis sangat berpengaruh terhadap kehidupan dan dinamika politik lokal di Indonesia. Latar belakang identitas etnis yang dimiliki calon kepala desa merupakan modal awal, seperti halnya dengan Kepala Desa Perdamaian yang terpilih. Ridwan berasal dari Etnis Banjar, etnis terbanyak kedua setelah etnis Jawa.

Sebagai kepala desa terpilih pada 2016, Ridwan memanfaatkan peluang untuk memperoleh suara terbanyak ditenhag pecahnya suara kandidat lainnya. Perbedaan latar belakang etnis yang dimiliki masyarakat Desa Perdamaian di mana terdapat etnis Jawa, Madina, Simalungun, dan Karo terlebih dari etnis yang sama dengannya yaitu Banjar menjadi berkah tersendiri bagi pemenang kontestasi ini karena soliditas suara masyarakat Etnis Banjar untuk mendukung beliau.

Ciri utama yang menjadi karakteristik yang melekat pada satu kelompok etnis adalah tumbuhnya suatu perasaan dalam satu komunitas (*sense of community*) di antara para anggotanya. Perasaan tersebut menimbulkan kesadaran akan hubungan yang kuat. Selain itu, tumbuh pula perasaan “kekitaan” pada diri setiap etnis yang sama maka terselenggaralah rasa kebersamaan.

Berbagai upaya atau tindakan dilakukan oleh seseorang dalam mempengaruhi pemikiran orang lain dalam membentuk rasa kebersamaan tersebut, Seperti halnya pada pemilihan kepala desa di desa perdamaian. Salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan melakukan pendekatan kepada lingkungan masyarakat. Adapun pendekatan yang dapat dilakukan yaitu pendekatan instrumentalis.

Pendekatan instrumentalis sendiri merupakan pendekatan konstruksi sosial, memandang terciptanya identitas sebagai produk manipulasi simbol-simbol kebudayaan dan kekerabatan oleh para pelaku politik untuk mendapatkan keuntungan politik.

Pendekatan ini memandang etnisitas sebagai hasil dari strategi politik, yang biasanya untuk mencapai tujuan yang lain, seperti

kekuasaan politik, akses ke sumber daya, dan meningkatkan status dan kekayaan. Intensitas hubungan yang dibangun dan diciptakan oleh masyarakat, tim sukses dan calon kepala desa memunculkan perasaan emosional seperti rasa simpati dan solidaritas. Perasaan emosional yang terbangun tersebutlah yang pada akhirnya membentuk kekerabatan. Hal tersebutlah yang dilakukan oleh Ridwan sebagai orang yang memenangkan kontestasi pemilukades di Desa Perdamaian dengan keberhasilannya membangun politik kekerabatan berdasarkan identitas etnis.

Pada pemilihan kepala desa tahun 2016, berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dapat dikatakan bahwa kemenangan Ridwan selaku calon kepala desa pada tahun 2016 tidak lepas dari keberhasilannya dalam mengemas dan menggunakan isu kesamaan etnis atau kekerabatan dalam pendekatan kepada masyarakat Desa Perdamaian. Semua dilakukan sebagai satu cara untuk meyakinkan masyarakat Desa Perdamaian untuk memilihnya. Identitas etnis tersebut pada dasarnya merupakan strategi pencitraan yang dibangun dalam upaya menarik simpati pemilih.

Pendekatan yang dilakukan Ridwan yaitu dengan mendatangi masyarakat secara langsung dalam setiap acara yang dilaksanakan di kawasan Desa Perdamaian dimana itu sudah merupakan suatu sikap "batulung-tolongan." Istilah "batulung-tolongan" merupakan suatu budaya dari Etnis Banjar yang memiliki makna saling tolong menolong. Isu "batulung-tolongan" yang diangkat tersebut yang pada akhirnya ikut menentukan pilihan masyarakat kepada kepala desa terpilih karena merasa diikat oleh satu identitas yang sama sehingga harus menolong orang atau kelompok yang sama dengan dirinya.

Selain mengemas falsafah Etnis Banjar dalam sikap "batulung-tolongan" dari masyarakat Desa Perdamaian falsafah lain yang juga digunakan dan dikemas oleh Ridwan yaitu falsafah dalam sikap "badingsanakan" (bersaudara), "kekulaan" (keluarga), "perwiritan" (pengajian) serta "mau hajak bakalah bamanang" (mau saja kalah menang).

Pada tradisi falsafah hidup orang banjar, tradisi atau budaya "kekulaan" (keluarga) merupakan perilaku yang ditunjukkan Ridwan yaitu berupa tindakan dengan mengajak atau meminta peran serta keluarga dekat atau keluarga jauh yang terdapat dalam silsilah keluarga beliau untuk memilih dan memercayakan beliau sebagai calon kepala desa tahun 2016. Selain itu beliau juga meminta warga dengan kesamaan

etnis untuk mendukung dan memilihnya dalam pilkades tahun 2016 tersebut.

Masyarakat Banjar juga dikenal sebagai bangsa Melayu muda yang cukup agamis. Oleh karena itu, tradisi keagamaan yang dilakukan oleh suku banjar adalah “perwiritan” (pengajian). Dalam upaya meningkatkan elektabilitasnya sebagai usaha untuk menciptakan kesan yang religious di hadapan masyarakat Desa Perdamaian, beliau sering menghadiri pengajian baik pada perwiritan malam ataupun perwiritan ibu-ibu.

Pada momen tersebut kemudian beliau secara tersurat meminta dukungan dari perwiritan wanita dan perwiritan pria untuk memilih beliau sebagai calon kepala Desa Perdamaian. Kehadiran beliau dalam kegiatan perwiritan secara rutin tersebut merupakan langkah kongkrit beliau dalam menarik simpati masyarakat. Semua falsafah hidup yang dipegang teguh dalam tradisi Etnis Banjar tersebut diaktualisasi dalam sebuah budaya dan tradisi masyarakat suku Banjar di Desa Perdamaian yang dikenal dengan istilah “bubuhan.”

Strategi yang dilakukan oleh Ridwan dalam memengaruhi masyarakat sebagai pemilih dengan cara membangun hubungan kekerabatan. Pembangunan dan pembentukan pembentukkan sistem kekerabatan bertujuan mendapat kepercayaan dari masyarakat sehingga dapat menambah dukungan suara pada pilkades tahun 2016.

Pada esensinya politik identitas sendiri merupakan partisipasi individual pada kehidupan sosial yang lebih di tentukan oleh budaya dan psikologis seseorang. Keberagaman etnis yang terdapat di Desa Perdamaian, dapat membentuk suatu kekuatan politik calon kepala desa. Hal tersebut dikarenakan dinamika kehidupan masyarakat kita masih berada pada kecenderungan primordial, bahkan perilaku politiknya masih dikategorikan partisipant di satu sisi namun parokial di sisi lainnya.

Dengan demikian kekuatan politik identitas ini merupakan kekuatan yang melekat pada etnis yang dijadikan sebagai sarana atau cara calon kepala desa Ridwan untuk meraih dukungan pada pemilihan kepala Desa Perdamaian tahun 2016. Sederhananya dapat digambarkan, bahwa politik etnis merupakan sesuatu yang bersifat hidup atau ada ditengah kehidupan masyarakat kita. Keberadaannya bersifat laten dan potensial, dan sewaktu-waktu ke permukaan sebagai kekuatan politik yang dominan pada proses pemilihan.

Pada manifestasinya, politik etnis merupakan aktualisasi partisipasi politik yang terkonstruksi dari akar budaya masyarakat

setempat, yang kemudian mengalami proses internalisasi secara terus-menerus di dalam kebudayaan masyarakatnya dalam suatu jalinan interaksi sosial.

Bagi masyarakat Desa Perdamaian sendiri faktor etnis tidak bisa dinafikan ikut andil dan menentukan pilihan politik seseorang. Hal tersebut bisa bersumber dari dua hal; **pertama**, tradisi yang ada pada masyarakat Desa Perdamaian sendiri terutama masyarakat Etnis Banjar yang masih memegang falsafah hidup dalam tradisi “bubuhan” di atas. **Kedua**, Ridwan sebagai calon yang datang dari Etnis Banjar mampu mengemas tradisi dan falsafah hidup Etnis Banjar tersebut ke dalam bentuk program dan kegiatan di Desa Perdamaian.

Di samping itu, perilaku calon kepala desa tersebut cukup dapat diterima masyarakat, bahkan masyarakat berpendapat sementara itu masih di ambang kewajaran dan tidak memecah belah suatu keadaan yang rukun maka perilaku tersebut sah saja untuk dilakukan. Muara dari perilaku tersebut berujung pada dukungan suara yang diberikan oleh masyarakat kepada beliau sehingga berhasil memenangkan kontestasi elektoral di Desa Perdamaian tahun 2016.

Keterlibatan etnis dalam dinamika politik lokal pada kajian yang dibangun oleh Abner Cohen mengatakan bahwa pada dasarnya etnisitas merupakan dari fenomena politik yang menggunakan symbol budaya tradisionalnya untuk di gunakan sebagai mekanisme artikulasi keberpihakan politik dimana jenis pengelompokan tersebut sebagai suatu pengelompokan kepentingan informal.<sup>12</sup>

Merujuk kepada pendapat Cohen tersebut dan dikaitkan dengan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Perdamaian Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, menunjukkan bahwasanya benar adanya persamaan etnis memiliki peran besar dalam mendulang suara pada kontestasi elektoral pada pemilihan kepala Desa Perdamaian tahun 2016. Identitas politik etnis hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa Perdamaian saat pemilihan kepala desa tahun 2016. Rasa kebersamaan dalam kesamaan etnis sangat memberikan kontribusi pada pembentukan pemikiran masyarakat Desa Perdamaian pada pemilihan kepala desa.

Berdasarkan beberapa pernyataan yang didapatkan dari hasil wawancara kepada informan, dapat dilihat bahwasanya masyarakat masih dominan memilih berdasarkan etnis. Hal tersebut menunjukkan bahwa politik identitas etnis masih hidup dan cukup berkembang di

---

<sup>12</sup>Abner Cohen, *Urban Ethnicity* (London: Routledge, 1974), halaman 97.

masyarakat. Meskipun keberadaannya bersifat laten, namun sangat potensial sehingga sewaktu-waktu dapat muncul ke permukaan sebagai kekuatan politik yang dominan dalam pemilihan.

Kemunculan perilaku memilih menurut etnis diawali oleh timbulnya kesadaran yang mengidentikan ke dalam masyarakat kesatuan golongan atau kelompok tertentu. Kesadaran ini kemudian memunculkan solidaritas kekelompokan atau etnis. Etnisitas merupakan kategori yang diterapkan pada kelompok atau kumpulan orang yang dibentuk dan membentuk dirinya dalam kebersamaan. Identitas etnisterikat dalam wujud perkumpulan orang yang dibalut dalam nuansa bahasa, adat istiadat, dan kepercayaan.

Penjelasan informan atau hasil wawancara kepada masyarakat Desa Perdamaian tersebut semakin memperkuat pandangan bahwasanya benar jika kesamaan etnis memiliki andil besar pada hasil pemilihan kepala Desa Perdamaian Kecamatan Binjai tahun 2016.

## **Penutup**

Politik identitas etnis menjadi komoditas serta isu strategis yang dipergunakan pada hampir semua kontestasi politik di Indonesia baik di tingkat nasional, daerah sampai di tingkat desa. Meskipun hak memilih dan dipilih merupakan hak dasar politik setiap individu yang dijamin oleh undang-undang, namun dalam jangka panjang kondisi tersebut bisa sangat mengawatirkan bagi kondisi demokrasi Indonesia.

Pola kekerabatan pada Etnis Banjar yang terdapat di Desa Perdamaian dalam pilkades yang kemudian dijadikan dan dikemas sebagai komoditas politik oleh Bapak Ridwan berupa “batulung-tolongan”, “badingsanakan” (bersaudara), “Kekulaan” (keluarga), “perwiritan” (pengajian) serta “mau hajak bakalah bamanang” (mau saja kalah menang) semua terangkum dalam suatu budaya yaitu “bubuhan” pada Etnis Banjar.

Kajian yang dilakukan pada saat kontestasi pilukades di Desa Perdamaian, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, menemukan fakta terhadap permainan politik identitas Etnis Banjar dalam kemenangan pilkades Desa Perdamaian tahun 2016.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### *Buku/Artikel*

*Abner Cohen, Urban Ethnicity (London: Routledge, 1974).*

*Agus Hiplinudin, Politik Identitas di Indonesia; Dari Zaman Kolonialis Belanda Hingga Repormasi (Yogyakarta: Calpulis, 2017).*

*Fredrik Barth, Kelompok-Kelompok Etnik dan Batasannya Tatanan Social Dari Perbedaan Kebudayaan (Jakarta: Universitas Indonesia, 1988).*

*Hasbullah, "Agama dan Etnisitas di Pentas Politik Lokal (Tinjauan Terhadap Penggunaan Symbol Agama dan Etnis dalam Pilkada," Jurnal Ushuluddin, Volume 17, No. 2, 2011.*

*Ilyas Lampe, "Identitas Etnik dalam Komunikasi Politik," dalam Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 8, Nomor 3, 2010.*

*Indris Hemay & Munandar Aris, "Politik Identitas dan Pencitraan Kandidat Gubernur Terhadap Perilaku Pemilih," dalam Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan, Volume 12. Nomor 01, 2016.*

*Kristianus, "Nasionalisme Etnik di Kalimantan Barat," dalam LIPI, edisi XXXVII, No. 2, 2011.*

*Sri Astuti Buchari, Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014).*

*Ubed Abdillah, Politik Identitas Etnis Pergulatan Tanda Tanpa Identitas (Jakarta: TransMedia Pustaka, 2002).*

### *Peraturan Perundang-undangan*

*UUDNRI Tahun 1945.*

*UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.*

*UU No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR.*

*UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.*